

Integrasi Pendidikan Ekonomi Kerakyatan Sebagai Upaya Pengembangan Jiwa Kewirausahaan

Marhana

STAI DDI Pangkep

marhana-staidi@yahoo.co.id

Abstract

Integrasi pendidikan ekonomi kerakyatan adalah satuan usaha yang mendominasi ragaan perekonomian rakyat, sedangkan ekonomi kerakyatan lebih merupakan kata sifat, yakni upaya memberdayakan kelompok atau satuan ekonomi yang mendominasi struktur dunia usaha. Dalam ruang Indonesia maka rakyat dalam konteks ilmu ekonomi selayaknya di terjemahkan sebagai kesatuan besar individu actor ekonomi dengan jenis kegiatan usaha berskala kecil dalam permodalannya, sarana teknologi produksi yang sederhana, manajemen usaha yang belum bersistem, dan bentuk kepemilikan usaha secara pribadi. Karena kelompok usaha dengan karakteristik seperti inilah yang mendominasi struktur dunia usaha Indonesia.

Kata Kunci: Integrasi, Ekonomi Kerakyatan, Kewirausahaan

Pendahuluan

Sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang Undang Dasar 1945, Negara Indonesia didirikan dengan tujuan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tanah tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Pengejawantahan dari amanat Undang Undang Dasar 1945 tersebut, khususnya yang berkaitan dengan frasa “memajukan kesejahteraan umum,” pada hakekatnya merupakan tugas semua elemen bangsa, yakni rakyat di segala lapisan di bawah arahan pemerintah. Tidak terlalu salah jika, mengacu pada definisi tujuan pendirian negara yang mulia tersebut, kesejahteraan dan kemakmuran bangsa Indonesia harus dicapai dengan menerapkan prinsip “dari, oleh, dan untuk rakyat.”

Konsep tersebut telah jauh-jauh hari dipikirkan oleh Bung Hatta (wakil presiden pertama Negara Kesatuan Republik Indonesia). Beliau, bahkan jauh sebelum Schumacher (yang terkenal dengan bukunya *Small is Beautiful*, dan Amartya Sen) pemenang Nobel 1998 Bidang Ekonomi, berpendapat bahwa ekonomi kerakyatan merupakan bentuk perekonomian yang paling tepat bagi bangsa Indonesia (Nugroho, 1997). Orientasi utama dari ekonomi kerakyatan adalah rakyat banyak, bukan sebagian atau sekelompok kecil orang. Pandangan tersebut lahir, menurut Baswir (2006), jauh sebelum Indonesia merdeka. Bung Hatta melalui artikelnya yang berjudul “Ekonomi Rakyat” yang diterbitkan dalam harian *Daulat Rakyat* (20 November 1933), mengekspresikan kegundahannya melihat kondisi ekonomi rakyat Indonesia di bawah penindasan pemerintah Hindia Belanda. Dapat dikatakan bahwa “kegundahan” hati Bung Hatta

atas kondisi ekonomi rakyat Indonesia—yang waktu itu masih berada di bawah penjajahan Belanda, merupakan cikal bakal dari lahirnya, katakanlah demikian, konsep ekonomi kerakyatan.

Dilain pihak konsep pembangunan yang selama ini diterapkan belum mampu menjawab tuntutan-tuntutan yang menyangkut keadilan dan pemerataan serta keberpihakannya kepada masyarakat, sehingga pembangunan yang digagas belum mampu mengangkat penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan. Upaya meningkatkan keberpihakan pembangunan kepada kepentingan masyarakat, seperti tidak dapat dilepaskan dari upaya pemberdayaan masyarakat agar mampu berpartisipasi dalam pembangunan dimaksud. Berbagai kendala dalam penerapan disebabkan adanya perbedaan persepsi dalam menyikapi tentang pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penulis ingin menguraikan pembahasan terakit dengan kerakyatan dan pemberdayaan ekonomi rakyat merupakan sistem ekonomi yang dikehendaki oleh masyarakat.

Integrasi Pendidikan Ekonomi Kerakyatan dan System Pendidikan Ekonomi Pasar

Pada integrasi pendidikan ekonomi rakyat tumbuh secara natural karena adanya jumlah potensi ekonomi di sekelilingnya. Mulanya mereka tumbuh tanpa adanya insentif artificial apapun, atau dengan kata lain hanya mengandalkan naluri usaha dan kelimpahan sumber daya alam, sumber daya manusia, serta peluang besar. Perlu dipahami bahwa dalam ruang ekonomi nasional pun terdapat sejumlah actor ekonomi konglomerat dengan bentuk usaha yang kontras dengan apa yang di ragakan oleh sebagian besar pelaku ekonomi rakyat. Memiliki modal yang besar, mempunyai akses pasar yang luas, menguasai usaha dari hulu ke hilir, menguasai teknologi produksi dan manajemen usahan modern. Kenapa mereka tidak di golongankan juga dalam ekonomi kerakyatan?. Karena jumlahnya hanya sedikit sehingga tidak merupakan representasi dari kondisi ekonomi rakyat yang sebenarnya. Atau dengan kata lain, usaha ekonomi yang di ragakan bernilai ekstrim terhadap totalitas ekonomi nasional. Golongan yang kedua ini biasanya walupun tidak semua lebih banyak tumbuh karena mampu membangun perner usaha yang baik dengan pengusaha sehingga memperoleh berbagai bentuk kemudahan usaha dan insentif serta proteksi bisnis . Mereka lahir dan berkembang dalam suatu system ekonomi yang selama ini lebih menekangka pada peran Negara yang dilakukan salah satunya melalui pengontrolan perusahaan swasta dengan rezim insentif yang memihak serta membangun hubungan istimewa dengan pengusaha – pengusah yang besar yang melahirkan praktik –praktik anti persaingan.

Lahirnya sejumlah pengusaha besar konglomerat yang bukan merupakan hasil derivasi dari kemampuan manajemen bisnis yang baik menyebabkan pondasi ekonomi nasional yang di bangun berstruktur rapuh terhadap persaingan pasar. Mereka tidak bisa di andalkan untuk menopang perekonomian nasional dalam system ekonomi pasar. Padahal ekonomi pasar di perlukan untuk menentukan harga yang tepat. Untuk menentukan posisi tawar – menawar yang imbang. Saya perlu menggaris bawahi bahwa yang patut mendapat kesalahan terhadap kegagalan pembangunan ekonomi nasional selama regim era reformasi adalah implementasi

kebijakan pembangunan ekonomi nasional yang tidak tepat dalam system ekonomi pasar, bukan ekonomi pasar itu sendiri. Dalam pemahaman seperti ini, saya merasa kurang memiliki justifikasi empiric untuk mempertanyakan kembali system ekonomi pasar, lalu mencari system dan paradigma baru diluar system ekonomi pasar untuk di rujuk dalam pembangunan ekonomi nasional. Bagi saya dunia "pasar" Adam smith adalah suatu dunia yang indah dan adil untuk di bayangkan. Tapi sanyannya sangat sulit untuk diacu untuk mencapai keseimbangan dalam tatanan perekonomian nasional. Karena konsep pasar yang di sodorkan oleh Adam smith sesungguhnya tidak pernah ada dan tidak pernah ada. Namun demikian tidak diartikan bahwa konsep pasar Adam smith yang relative bersifat utopis ini harus di abaikan . Persepektif yang perlu di anut adalah bahwa ke indahan , keadilan dan keseimbangan yang di bangun melalui mekanisme "pasarnya" Adam smith adalah suatu yang harus di akui keberadaannya, minimal telah di buktikan minimal suatu review teoritis. Yang perlu di lakukan adalah upaya upaya untuk mendekati kondisi indah. Adil, dan seimbangmelalui berbagai regulasi pemerintah sebagai wujud intervensi yang seimbang dan kontekstual. Bukan sebaliknya membangun suatu format yang di luar "ekonomi pasar" untuk di acu dalam pembangunan ekonomi nasional, yang keberhasilannya masih mendapat tanda tanya besar atau minimal belum dapat di buktikan melalui suatu kajian teoritis- empiris.

Pembangunan ekonomi Indonesia yang di jalankan berdasarkan mekanisme pasar sering tidak berjalan dengan baik, Khususnya sejak era reformasi, kegagalan pembangunan ekonomi Indonesia yang di jadikan berdasarkan mekanisme pasar ini antara lain karena kegagalan pasar itu sendiri , intervensi pemerintah yang tidak benar , tidak efektifnya pasar tersebut berjalan daan diantaranya pengaruh eksternalkemudiang sejak sidang istimewa SI 1998, dihasilkan suatu TAP MPR Mengenai Demokrasi Ekonomi yang antara lain berisikan tentang keberpihakan yang sangat kuat terhadap usaha kecil- menengah serta koperasi . Keputusan politik ini sebenarnya menandai suatu babak baru di mana bangun ekonomi yang mendominasi regaan struktur ekonomi nasional mendapat tempat tersendiri. Komitmen pemerintah untuk mengurangi gap penguasaan ast ekonomi antara sebagian besar pelaku ekonomi di tingkat rakyat dan sebagian kecil pengusaha besar konglomerat, perlu mendapat dukungan dari berbagai pihak. Hasil yang di diharapkan adalah terciptanya struktur ekonomi yang berimbang antara pelaku ekonomi dalam negeri demi mengamangkan pencapain dalam target pertumbuhan growth Gillis et al 2015 Bahwa kegagalan kebijakan pembangunan ekonomi nasional masa era reformasi dengan keberpihakan yang berlebihan terhadap kelompok pengusaha besar perlu diubah. Sudah saatnya dan cukup adil jika pengusaha kecil – menengah dan bangun usaha koperasi mendapat kesempatan secara ekonomi untuk berkembang sekaligus mengejar ketertinggalan yang selama ini mewarnai buruknya tampilan struktur ekonomi nasional. Sekali lagi komitmen politik pemerintah ini perlu, mendapat dukungan dari berbagai pihak. Hal yang masih kurang jelas dalam TAP MPR di maksud adalah apakah perspektif pembangunan nasional dengan ke berpihakan kepada usaha kecil menengah dan koperasi ini masih di jalankan melalui mekanisme pasar. Dalam arti apakah intervensi pemerintah dalam bentuk keberpihakan kepada usaha kecil- menengah dan koperasi ini adalah benar – benar merupakan affirmative action untuk memperbaiki distrorsi pasar yang selam ini terjadi karena bentuk campur tangan pemerintah dalam pasar yang tidak

benar. Atau pemerintah mulai ragu dengan bekernyanya mekanisme pasar itu sendiri sehingga berupaya meninggalkannya dan mencoba merujuk pada suatu mekanisme system ekonomi yang baru. Nampak nya kita berada dalam semua pilihan yang di lemat. Mau meninggalkan mekanisme pasar dalam sitem ekonomi nasional , kita masih ragu- ragu , karena pengalaman keberhasilan pembangunan ekonomi Negara-negara maju saat ini selalu merujuk pada bekerjanya mekanisme pasar. Mau merujuk pada bekerja suatu mekanisme yang baru , apapun namanya. Dalam prakteknya belum ada Negara satupun yang cukup berpengalaman serta yang paling penting menunjukkan keberhasilan nyata,bahkan kita sendiri belum berpengalaman, ibarat membeli kucing dalam karung. Bukti keragu-raguan ini tercermin dalam TAP MPR hasil sidang istimewa itu sendiri, di mana demokrasi ekonomi nasional tidak semata-mata di jalankan dengan keberpihakan habis-habisan pada usaha kecil menengah dan koperasi, tapi perusahaan swasta besar BUMN tetap mendapat tempat bahkan mempunyai peran yang sangat strategis.

Jika kita semua jernih melihat dan jujur mengakui bahwa kegagalan-kegagalan pembangunan ekonomi nasional selama ini terjadi bukan di sebabkan oleh karena ketidak mampuan mekanisme pasar mendukung keberhasilan pembangunan ekonomi nasional, tetapi lebih di sebabkan karena pasar sendiri tidak di beri kesempatan untuk bekerja secara baik. Bentuk campur tangan pemerintah yang seharusnya di arahkan untuk menjamin bekerjanya mekanisme pasar guna mendukung keberhasilan pembangunan ekonomi nasional, ternyata dalam prakteknya lebih di arahkan pada keberpihakan yang berlebihan kepada pengusaha besar,dalam bentuk intensif maupun regim proteksi yang ekstrim. Pengalaman pembangunan ekonomi nasional,dengan kebijakan proteksi bagi kelompok industry tertentu yana di amsumsikan sebagai inflan industry dan di harapkan menjadi ‘ Lokomotif ‘ yang akan menarik herbong ekonomi lainnya, pada akhirnya bermuara pada incapability dan inefficiency dari industry yang bersangkutan, contoh pengembangan industry pengembangan otomotif ,periode waktu yang telah di tetapkan untuk berkembang menjadi suatu bisnis yang besar dengan skala dan skop serta melibatkan sejumlah besar pelaku ekonomi di dalamnya, menjadi tidak bermakna saat di hadapkan dengan kenyataan bahwa bisnis yang masih bersangkutan masih tetap pada lever perkembangan”bayi” karena di manjakan berbagai intensif dan berbagi bentuk proteksi. Saya juga kurang setuju dengan pendapat bahwa mekanisme pasar tidak dapat menjalankan fungsi social dlam pembangunan ekonomi nasional. Pendapat seperti ini juga tidak benar secara absolute. Buktinya Negara –negara maju yang selalu merujuk bekerjanya mekanisme pasar dengan baik, mampu menjalankan fungsi social dalam pembangunan ekonominya secara baik pula. Sudah menjadi pengetahuan yang luas bahwa Negara –negara maju termasuk beberapa Negara berkembang seperti singapura, mempunyai suatu system social security jangka panjang yang berfungsi secara permanen untuk membantu kelompok masyarakat yang inferior dalam kompetisi memperoleh akses ekonomi. Justru Negara –negara yang masih setengah hati mendorong bekerjanya mekanisme pasar seperti Indonesia. Tidak mampu menjalankan fungsi social dalam pembangunan ekonominya secara mantap, sebenarnya sudah banyak program jaminan social temporer semacam JPS di Indonesia, namun pelaksanaanya masih jauh dari memuaskan , karena kurang mantapnya perencanaan terjadi banyak penyimpanan dalam implementasi serta lemahnya pengawasan.

Ekonomi kerakyatan sejak awal, bahwa semua pihak perlu mendukung affirmative action policy pada usaha kecil menengah dan koperasi yang di ambil oleh pemerintah sesuai dengan tuntutan TAP MPR. Pembangunan harus di kembangkan dengan berbasis ekonomi domestic, bila perlu daerah kab/kota dengan tingkat kemndirian yang tinggi, kepercayaan diri dan kesetaraan, meluasnya kesempatan berusaha dan pendapatan, partisipatif, adanya persaingan yang sehat, keterbukaan, demokratis dan pemerataan yang berkeadilan. Semua ini merupakan ciri –ciri ekonomi kerakyatan yang kita tuju bersama . kita akan membahas lebih jauh tentang kekurangan konsep ekonomi kerakyatan yang di dengarkan oleh pemerintah.

Pendidikan Ekonomi Kerakyatan dan Pemberdayaan Pendidikan Ekonomi Rakyat

Dalam kaitan dengan pendidikan ekonomi kerakyatan tidak bisa hanya sekedar komitmen politik untuk merubah kecenderungan dalam system ekonomi liberal yang sangat membela kaum pengusaha besar khususnya konglomerat. Perubahan itu hendaknya di laksanakan benar-benar memberi perhatian utama pada rakyat kecil lewat program operasi yang nyata dan mampu merangsang kegiatan ekonomi produktif di tingkat rakyat sekaligus memupuk jiwa kewirausahaan. Tidak dapat di sangkal bahwa membangun ekonomi kerakyatan membutuhkan adanya komitmen politik, tetapi menyamakan ekonomi kerakyatan dengan praktek membagi- bagi uang kepada rakyat kecil, Saya tidak membuat penilaian terhadap system JPS , adalah suatu kekeliruan besar dalam perspektif ekonomi kerakyatan yang benar. Praktek membagi-bagi uang kepada rakyat kecil sangat tidak menguntungkan pihak mana pun, termasuk rakyat kecil sendiri, pendekatan seperti ini jelas sangat berbeda dengan apa yang di maksud affirmative action . Aksi membagi bagi uang dengan tidak sadar menyebabkan usaha kecil menengah dan koperasi yang selama ini tidak berdaya untuk bersaing dalam suatu mekanisme pasar menjadi sangat tergantung pada aksi di maksud. Sebenarnya yang harus ada pada tangan obyek affirmative action adalah kesempatan untuk berkembang dalam suatu mekanisme pasar yang sehat, bukan cas money / cas material, jika pemahaman ini tidak di bangun sejak awal, maka saya kwatir dengan cerita keberpihakan yang salah selama era reformasi kembali akan terulang. Tidak terjadi proses pendewasaan dalam ragaan bisnis usaha kecil menengah dan koperasi yang ,menjadi target affirmative action policy. Bahkan sangat mungkin terjadi yang bersifat counter productive, karena asumsi awal yang dianut adalah usaha kecil menengah dan koperasi yang merupakan ciri ekonomi kerakyatan Indonesia tumbuh secara natural karena adanya sejumlah potensi ekonomi di sekelilingnya. Mulanya meraka tubuh tanpa adanya insentif artifisial apapun, dengan kata lain hanya mengandalkan naluri usaha dan kelimpahan sumber daya alam , sumber daya manusia, serta peluang pasar. Modal besar yang di miliki inilah yang seharusnya di tumbuh kembangkan dalam suatu mekanisme pasar yang sehat, bukan sebaliknya di tiadakan dengan menciptakan ketergantungan model baru pada kebijakan keberpihakan di maksud.

Selanjutnya pemerintah harus mempunyai ancaman yang pasti tentang kapan seharusnya pemerintah mengurangi bentuk campur tangan dalam affirmative action policinya. Untuk mendorong ekonomi kerakyatan berkembang secara sehat oleh karena itu di perlukan adanya kajian ekonomi yang akurat timing dan proses di mana pemerintah harus mengurangi bentuk keberpihakannya pada usaha kecil menengah dan koperasi dalam pembangunan ekonomi

rakyat. Wacana ini perlu mendapat perhatian tersendiri, karena sampai saat ini masih banyak pihak di luar UKM dan Koperasi yang memanfaatkan momen keberpihakan pemerintah ini sebagai free-rider . Justru kelompok ini yang enggang mendorong adanya proses phasing – out untuk mengkerasi mekanisme pasar yang sehat dalam rangka mendorong keberhasilan program ekonomi kerakyatan. Kita semua masih mengarahkan seluruh energy yang mendukung program keberpihakan pemerintah pada UKM dan koperasi sesuai dengan tuntutan TAP MPR. Tapi kita lupa bahwa ada tahapan lainnya yang penting dalam program keberpihakan di maksud, yaitu Phasing-out proses yang harus pula di persiapkan sejak awal kalau tidak maka sekali lagi kita akan mengulangi kegagalan yang sama seperti masa pemerintahan era reformasi.

Pemberdayaan terhadap Integrasi Pendidikan Ekonomi Rakyat di Sulawesi-Selatan

Kita telah membahas konsep ekonomi kerakyatan dalam pembangunan ekonomi nasional melalui program program keberpihakan pemerintah terhadap UKM dan koperasi. Masih ada masalah lain yang perlu di bahas dalam hubungan dengan internal condition UKM dan koperasi. Beberapa kajian empiris menunjukkan bahwa permasalahan umum yang di hadapi oleh UKM dan koperasi adalah; keterbatasan akses terhadap sumber –sumber pembiayaan dan permodalan, keterbatasan penguasaan teknologi dan informasi, keterbatasan akses pasar, keterbatasan organisasi dan pengelolaannya.

Komitmen keberpihakan pada UKM dan Koperasi di dalam perspektif ekonomi kerakyatan haru benar benar di arahkan untuk mengatasi masalah masalah yang di sebut diatas. Program pengembangan ekonomi rakyat memerlukan adanya program- program operasional di tingkat bawah bukan sekedar jargon-jargon politik yang hanya berada pada tataran konsep. Hal ini perlu di tegaskan agar pembahasan tentang ekonomi kerakyatan tidak hanya berhenti pada suatu konsep abstrak , seperti pembahasan tentang konsep “binatang ” diatas tapi perlu di tindaklanjuti dengan pengembangan- pengembangan operasional yang diarahkan untuk mengatasi persoalan keterbastasan akses kebanyakan rakyat kecil, ini adalah suatu model pendekatan structural .

Pada era otonomisasi saat ini, konsep pembangunan ekonomi kerakyatan harus di terjemahkan dalam bentuk program operasional berbasiskan ekonomi domestic pada tingkat kabupaten dan kota dengan tingkat kemandirian yang tinggi. Namun demikian perlu di tegaskan bahwa pengembangan ekonomi kerakyatan pada era otonomisasi saat ini tidak harus diterjemahkan dalam prespektif territorial. Tapi sebaliknya di kembangkan dalam prespektif ‘ regionalisasi’ diman di dalamdannya terintegrasi kesatuan potensi, kenggulan peluang dan karakter social budaya.

Pada tingkat regional Sulawesi-Selatan, masih terdapat persoalan mendasar yang “mengurung ” para pengusaha kecil menengah dan koperasi termasuk di dalamnya usaha di bidang pertanian. Untuk melakukan rasionalisasi dan ekspansi usaha sekalipun sudah banyak program pemberdayaan ekonomi yang langsung menyentuh rakyat di tingkat bawah telah di laksanakan baik oleh pemerintah maupun lembaga – lembaga non pemerintahan, tetapi sebagian besar rakyat kecil masih sulit untuk mengaktualisasikannya dangan ragaan usaha

mereka. Tingkat pencapaian tertinggi yang paling banyak di peroleh dari program –program di maksud adalah hanya terbatas pada tumbuhnya kesadaran berfikir dan hasrat untuk maju. Tetapi ada semacam jarak antara kesadaran berfikir dan realitas perilaku. Persoalan mendasar yang mengurung ini mungking ada kaitannya dengan system nilai budaya yang sudah mengakar pada diri pelaku ekonomi rakyat di Sulawesi-Selatan secara turun temurun. Sitem nilai budaya ini yang banyak mendeterminasi perilaku actor ekonomi rakyat di Sulawesi-Selatan, termasuk di dalamnya cara pandang tentang usaha , cara pandang tentang keuntungan, cara pengelolaan keuangan sikap terhadap mitra dan competitor , startegi menghadapi resiko dsb. Oleh karena itu saya setuju dengan pendapat yang mengatakan bahwa program pemberdayaan ekonomi rakyat, Khussusnya di Sulawesi-Selatan, sebaiknya di mulai dengan program rekayasa social budaya untuk merubah iner life, dan mengkondisikan suatu tatanan masyarakat yang akomodatif terhadap tuntunan pasar untuk maju. Ini adalah suatu model pendekatan lain yang di sebut pendekatan cultural. (*cullyural approach*).

Kesimpulan

Ekonomi rakyat tumbuh secara natural karena adanya jumlah potensi ekonomi di sekelilingnya. Mulanya mereka tumbuh tanpa adanya insentif artificial apapun, atau dengan kata lain hanya mengandalkan naluri usaha dan kelimpahan sumber daya alam, sumber daya manusia, serta peluang besar. Perlu dipahami bahwa dalam ruang ekonomi nasional pun terdapat sejumlah actor ekonomi konglomerat dengan bentuk usaha yang kontras dengan apa yang di ragakan oleh sebagian besar pelaku ekonomi rakyat.

Ekonomi kerakyatan tidak bisa hanya sekedar komitmen politik untuk merubah kecenderungan dalam system ekonomi liberal yang sangat membela kaum pengusaha besar khususnya konglomerat.

Beberapa kajian empiris menunjukkan bahwa permasalahan umum yang di hadapi oleh UKM dan koperasi adalah; keterbatasan akses terhadap sumber –sumber pembiayaan dan permodalan, keterbatasan penguasaan teknologi dan informasi, keterbatasan akses pasar , keterbatasan organisasi dan pengelolaannya.

References

- Abimanyu, Anggito. 2000, Ekonomi Indonesia baru, kajian dan alternative solusi menuju pemuliahan, Elex Media Komputindo, Jakarta
- Asry'arie Musa. 2014, keluar dari krisis multi dimensi, lembaga studi filsafat islam, Yogyakarta.
- Gillis, Malcolm; Perkins, Dwight, H. Roemer Donald R. 2013 Economics of development, 2nd Ed. W.W.Norton dan Company, New York.
- Kladen, Ignas.2000, Persepsi dan Mispersepsi tentang pemulihan ekonomi Indonesia, pokok pokok pikiran dalam menggugat masa lalu, menggahas masa depan ekonomo Indonesia. PT Kompas Media Nusantara, Jakarta
- Prawirokusumo, soeharto 2015. Ekonomi rakyat, Kosep, kebikajan dan strategi BPFE, Yogyakarta

Vol. 8, No. 2, Mei 2019
ISSN 2302-1330

Simanjuntak, Disman, S. 2015, Ekonomi pasar social Indonesia , Jakarta
Tara, Azwir Dainy, 2015, Strategi membangun ekonomi rakyat, Jakarta.